

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sekolah merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Ukuran dan jenis sekolah bervariasi tergantung dari sumber daya dan tujuan penyelenggara pendidikan (wikipedia.org, 2008).

Belajar yang menggunakan program terencana disebut pendidikan formal atau disebut juga pendidikan sekolah. Sekolah, baik yang umum ataupun khusus telah didirikan sebagai tempat yang formal untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan pendidikan di suatu tingkatan umur. Masyarakat menerima tanggung jawab untuk mengorganisasikan bangunan-bangunan dan alat-alat, membuat hukum-hukum dan aturan-aturan pendidikan dan membimbing pendidikan para guru dengan memberikan pengetahuan standar minimum (Kasijan, 1984). Fungsi sekolah itu sendiri menurut Kasijan (1984) adalah menanamkan dasar-dasar yang penting untuk penguasaan pengetahuan-pengetahuan, kecakapan-kecakapan dan sikap-sikap yang telah mulai dibina dalam rumah tangga selama pemulaan masa kanak-kanak.

Saat ini banyak pihak yang berusaha menyoroti sistem pendidikan nasional kita dari berbagai sudut pandang. Pro dan kontra sudah menjadi hal yang biasa, terutama jika dikaitkan dengan kebingungan pemerintah, pengamat,

pemerhati, atau bahkan guru sendiri sebagai pelaku pendidikan di Indonesia tentang akan dibawa kemana pendidikan Indonesia ini. Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Indonesia sudah dengan tegas menerangkan hal yang terkait dengan pendidikan, namun pada kenyataannya kita belum memiliki orientasi yang jelas dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia (Herdiana, 2007).

Sistem Pendidikan Nasional mengalami perubahan secara signifikan setelah reformasi total di tahun 1998. Perbaikan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dari kurikulum 1968 ke kurikulum 1975, kemudian diperbaharui dengan kurikulum 1984, diperbaharui lagi dengan kurikulum 1994 sebagai penggantinya, dan mulai tahun 2004 diberlakukan kurikulum 2004 yang dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pada tahun 2006 diberlakukan lagi kurikulum baru yang disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau disingkat KTSP (Sujanto, 2007).

Otonomi sudah dilaksanakan sejak tahun 2001. Bersamaan dengan itu, maka hampir semua bidang pembangunan juga diotonomikan tidak terkecuali bidang pendidikan. Otonomi di bidang pendidikan dilakukan secara berjenjang yakni dimulai pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan sekolah. Pemerintah memberikan otonomi kepada kepala sekolah untuk dapat menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah (Sujanto, 2007).

Dunia pendidikan kini tengah menggandrungi sekolah "*full day system*" yaitu sekolah sehari penuh yang dimulai dari pagi hingga sore hari. Sekolah *full day* ini dianggap sebagai model sekolah umum yang memadukan sistem